

Judul : Taufik Kurniawan : Asumsi Makro RAPBN 2017 Harus Berdasarkan Kondisi Mikro
Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Taufik Kurniawan: Asumsi Makro RAPBN 2017 Harus Berdasarkan Kondisi Mikro

DPR RI menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda mendengar pandangan pemerintah terhadap pandangan fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

DALAM rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8), pihak pemerintah diwakili Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, selaku pimpinan rapat mengatakan, Badan Anggaran DPR RI akan menindaklanjuti dengan melakukan tahapan-tahapan pendalaman. Utamanya terkait kondisi kekinian ekonomi bangsa.

"Kemudian, yang kedua, mungkin ada terobosan-terobosan baru bersama dukungan terhadap pemerintah oleh DPR yang tidak hanya mengandalkan *tax amnesty*, tetapi juga mengendalikan defisit pada transaksi yang sedang berjalan," ucap Taufik.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengharapkan pemerintah tidak hanya menjadikan situasi asumsi makro sebagai slogan. Asumsi makro tersebut diharapkan mencerminkan kondisi-kondisi riil ekonomi mikro dari masyarakat.

"Harus tercakup di situ. Jangan hanya berkutat pada asumsi makro yang tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat," jelasnya.

Ia menjabarkan situasi mikro ekonomi yang terjadi, antara lain, daya beli masyarakat yang semakin rendah, kesenjangan ekonomi antara kaum miskin dan kaya yang kian lebar, *gini ratio* yang meningkat, dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit.

Karena itu, ia menyarankan pemerintahan Jokowi-JK memang perlu untuk melakukan



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didampingi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Fraksi Terhadap RAPBN 2017 dari Menkeu Sri Mulyani.

alternatif terobosan yang lain. Salah satunya dengan melakukan program infrastruktur.

"Hal itu bertujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Karena bila infrastruktur bagus dan daya beli juga bagus, maka barang dan jasa akan semakin terjangkau," tegasnya.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,3 persen dalam RAPBN 2017 dan diupayakan akan lebih bersifat terbuka (inklusif) yang dirancang secara realistis juga lebih berkualitas.

Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar itu, pemerintah mengharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi angka kemiskinan. Sri juga menegaskan pemerintah akan tetap mengupayakan menurunkan angka kemiskinan pada kisaran 9,5 sampai 10,5 persen pada tahun 2017.

Hal itu dilakukan melalui upaya perbaikan dan keberlan-

jutaan program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya, seperti program penyediaan layanan dasar publik, perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial dan program keluarga harapan (PKH).

Kemudian, lanjutnya, tentang ketimpangan pendapatan. Pemerintah akan berupaya menurunkan ketimpangan pendapatan dengan cara melakukan perbaikan distribusi pendapatan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta peningkatan peran daerah dan atau desa dalam pembangunan.

Dia menerangkan pemerintah

menetapkan asumsi dasar ekonomi makro lainnya untuk digunakan sebagai acuan dalam perhitungan berbagai komponen RAPBN tahun 2017, seperti tingkat inflasi 4 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Rp 13.300, tingkat suku bunga SPN tiga bulan 5,3 persen harga minyak mentah Indonesia US\$ 45 per barel, serta *lifting* minyak gas 1.150 ribu barel setara minyak per hari juga telah dilakukan secara realistis, dengan tetap memerhatikan risiko, baik global maupun domestik, sebagaimana yang diharapkan oleh fraksi di DPR. ■TIM

” Hal itu bertujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Karena bila infrastruktur bagus dan daya beli juga bagus, maka barang dan jasa akan semakin terjangkau.